

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie. Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UUJN*. Bandung: Refika Aditama.
- Asshiddiqie. Jimly. 2005. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie. Jimly. 2013. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhadie. Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Dicey. A.V. 1982. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Hadjon. Philipus M. 2005. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- HS. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: Rajawali Press.
- Kelsen, Hans. 2006. *Pure Theory of Law*. Jakarta: Nusa Media (Terjemahan).
- Marzuki dan Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad dan Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2014. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pasamai dan Syamsuddin. 2007. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Rahardjo. Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo. Satjipto. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto dan Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Somardi. 2007. *General Theory of Law and State. Teori Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif (Hans Kelsen)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Suryabrata. Sumardi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tutik Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenamedia Group.

Jurnal

- Anton. 2016. *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan."* Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Julyatmikha. I Komang Ferdyan dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. 2025. *"Kewenangan Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat pada Perseroan Terbatas."* Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 10 No. 1. Bali: Universitas Udayana.
- Puspita Lidya. Sudirman Maman. dan Benny Djaja. 2024. *"Protection of The Notary in Monitoring Beneficial Ownership to Prevent The Misuse of Issued Document."* Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 8 No. 3. Malang: Universitas Islam Malang.
- Razak. M.A. Patittingi F. dan Maskun. 2020. *"Pemetaan Sertipikat Secara Digital (Plotting) dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah."* Petikum. Vol. 8 No. 2. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Stephani dan Ersya. 2019. *"Perluasan Kewenangan Notaris sebagai Pihak Penyampai Informasi dan Kendala Implementasi Penatausahaan Dokumen Terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018."* Otentik: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 1 No. 2. Jakarta: Universitas Pancasila.

Tesis

- Sari dan Suci Indah Nadhifah. 2024. *Implementasi Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat oleh Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas.* Tesis Magister Kenotariatan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Wijayanti dan Nurlita. 2024. *Peran Notaris dalam Implementasi Prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.* Tesis Magister Kenotariatan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Yudha dan Reinaldy Wiratama. 2021. *Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi.* Tesis Magister Kenotariatan. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Internet

- Gramedia. 2025. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. diakses 10 Maret 2025.
- Repository Universitas Sriwijaya. 2025. <https://repository.unsri.ac.id/141375/....> diakses 21 April 2025.
- Repository UIN Suska Riau. 2025. <https://repository.uin-suska.ac.id/20573/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf>. diakses 21 April 2025.
- Antara News. 2025. Kemenkumham Blokir Akses 107 Juta Perusahaan Belum Laporan Data BO. <https://www.antaraneews.com/berita/4262667/....>
- TVRI Jakarta News. 2025. <https://tvrijakartanews.com/article/News/10663?hl=id-ID>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LNRI Tahun 2010 No. 122.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LNRI Tahun 2007 No. 106.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. LNRI Tahun 2018 No. 24.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat. BNRI Tahun 2019 No. 395.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemenkumham.

Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Laporan & Dokumen Resmi

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). 2024. Laporan Statistik Korporasi yang Diblokir 2021–2024. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 2021. Laporan Tahunan PPATK 2021. Jakarta: PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 2022. Laporan Tahunan PPATK 2021–2022. Jakarta: PPATK.

Publikasi Internasional

FATF. 2014. *Guidance on Transparency and Beneficial Ownership*. Paris: FATF/OECD.

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 2021. *Pandora Papers: Offshore Havens and Hidden Riches of World Leaders and Billionaires*. Washington D.C.: ICIJ.

Tempo. 2021. “Orang Indonesia dalam Pandora Papers”. Majalah Tempo, Edisi Oktober 2021.

Wawancara

Wawancara dengan Notaris NA. Makassar. 9 September 2025.

Wawancara dengan Notaris RN. Makassar. 28 Agustus 2025.

Wawancara dengan Notaris CD. Makassar. 1 September 2025.

Wawancara dengan Notaris MH. Makassar. 9 September 2025.

Wawancara dengan Notaris RH. Palu. 15 September 2025.

Wawancara dengan Notaris Dr. Mustahar, S.H., M.Kn.. Makassar. 26 September 2025.

Wawancara dengan Perwakilan Korporasi A. Makassar. 30 Agustus 2025.

Wawancara dengan Perwakilan Korporasi B. Palu. 16 September 2025.

Wawancara dengan Perwakilan Korporasi C. Palu. 18 September 2025.

Wawancara dengan Syaiful. Pelaksana Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Makassar. 2
September 2025.

Wawancara dengan Adi Kurniawan. Analis Hukum Ahli Muda dan Ketua Tim Kerja
Perseroan dan Pemilik Manfaat pada Direktorat Badan Usaha. Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. 15 Oktober 2025.